



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 747 TAHUN 2018 TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Jenis Jabatan Fungsional telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa subtansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2016](#) tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
8. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan ...

11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018](#) tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 066 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 747 TAHUN 2018 TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 066 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Usulan formasi jabatan fungsional disampaikan Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan melampirkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Agustus 2022  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 9 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 94 TAHUN 2022

TANGGAL: 9 Agustus 2022

---

JENIS JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
1	Administrator Database Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri
2	Analisis Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri
3	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri
4	Pemadam Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri
5	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
6	Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
7	Penata Perizinan	Kementerian Dalam Negeri
8	Analisis Hukum	Kementerian Hukum dan HAM
9	Penyuluh Hukum	Kementerian Hukum dan HAM
10	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Hukum dan HAM
11	Pengawas Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
12	Administrator Kesehatan	Kementerian Kesehatan
13	Apoteker	Kementerian Kesehatan
14	Asisten Apoteker	Kementerian Kesehatan
15	Asisten Penata Anestesi	Kementerian Kesehatan
16	Bidan	Kementerian Kesehatan
17	Dokter	Kementerian Kesehatan
18	Dokter Gigi	Kementerian Kesehatan
19	Dokter Pendidik Klinis	Kementerian Kesehatan
20	Entomolog Kesehatan	Kementerian Kesehatan
21	Epidemiolog Kesehatan	Kementerian Kesehatan
22	Fisikawan Medis	Kementerian Kesehatan
23	Fisioterapis	Kementerian Kesehatan
24	Nutrisionis	Kementerian Kesehatan

25. Okupasi ...

25	Okupasi Terapis	Kementerian Kesehatan
26	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kementerian Kesehatan
27	Penata Anestesi	Kementerian Kesehatan
28	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kementerian Kesehatan
29	Perawat	Kementerian Kesehatan
30	Perekam Medis	Kementerian Kesehatan
31	Pranata Kesehatan Laboratorium	Kementerian Kesehatan
32	Psikolog Klinis	Kementerian Kesehatan
33	Radiografer	Kementerian Kesehatan
34	Refraksionis Optisien	Kementerian Kesehatan
35	Sanitarian	Kementerian Kesehatan
36	Teknisi Elektromedis	Kementerian Kesehatan
37	Teknisi Gigi	Kementerian Kesehatan
38	Teknisi Transfusi Darah	Kementerian Kesehatan
39	Terapis Gigi dan Mulut	Kementerian Kesehatan
40	Terapis Wicara	Kementerian Kesehatan
41	Instruktur	Kementerian Ketenagakerjaan
42	Mediator Hubungan Industrial	Kementerian Ketenagakerjaan
43	Pengantar Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan
44	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kementerian Keuangan
45	Asisten Pranata Siaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika
46	Pengendali Frekuensi Radio	Kementerian Komunikasi dan Informatika
47	Penguji Perangkat Telekomunikasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
48	Pranata Hubungan Masyarakat	Kementerian Komunikasi dan Informatika
49	Pranata Siaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika
50	Teknisi Siaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika
51	Pengawas Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

52. Pengendali ...

52	Pengendali Dampak Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
53	Penyuluh Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54	Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
55	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
56	Pembina Jasa Kontruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
57	Penata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
58	Teknik Jalan dan Jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
59	Teknik Pengairan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
60	Teknik Penyehatan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
61	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
62	Pelatih Olah Raga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
63	Guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
64	Pamong Belajar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
65	Pamong Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
66	Pengawas Sekolah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
67	Penilik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
68	Analisis Perdagangan	Kementerian Perdagangan
69	Penera	Kementerian Perdagangan
70	Pengamat Tera	Kementerian Perdagangan
71	Pengawas Kemetrolgian	Kementerian Perdagangan
72	Pengawas Perdagangan	Kementerian Perdagangan

73. Penguji ...

73	Penguji Mutu Barang	Kementerian Perdagangan
74	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan
75	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian Perindustrian
76	Analisis Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian
77	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian
78	Medik Veteriner	Kementerian Pertanian
79	Paramedik Veteriner	Kementerian Pertanian
80	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian
81	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Kementerian Pertanian
82	Penyuluh Pertanian	Kementerian Pertanian
83	Penerjemah	Kementerian Sekretariat Negara
84	Pekerja Sosial	Kementerian Sosial
85	Penyuluh Sosial	Kementerian Sosial
86	Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia
87	Surveyor Pemetaan	Badan Informasi Geospasial (BIG)
88	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara
89	Asesor SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Negara
90	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara
91	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
92	Penata Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
93	Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
94	Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
95	Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
96	Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik
97	Statistisi	Badan Pusat Statistik
98	Analisis Perkebunrayaan	Badan Riset dan Inovasi Nasional
99	Peneliti	Badan Riset dan Inovasi Nasional

100	<i>Rescuer</i>	Badan SAR Nasional (BASARNAS)
101	Analisis Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara
102	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
103	Sandiman	Lembaga Sandi Negara
104	Pustakawan	Perpustakaan Nasional
105	Perisalah Legislatif	Sekjen DPR

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002